

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

**KANTOR KECAMATAN SONGGOM
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN SONGGOM**

JL.RAYA JATIROKEH - SONGGOM NO 119 KODE POS 52266

E – mail : kecsonggombbs@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Songgom dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah yang diatur kemudian dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah dan secara Birokrasi diatas dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

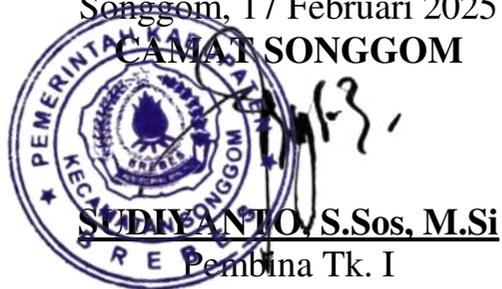
LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban, pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Songgom telah diukur, dievaluasi,dianalisa,dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP Kecamatan Songgom.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dimasing – masing perangkat daerah serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip GOOD GOVERMENT, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan pemerintah.

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Songgom, 17 Februari 2025

CAMAT SONGGOM



SUDIYANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680720 199102 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur organisasi Kecamatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Gambaran umum organisasi meliputi :

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi.
2. Sumberdaya Kepegawaian dan Sarana Prasarana.

A.1. Kedudukan, Tugas, Pokok dan Susunan Organisasi

1. Kedudukan

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes nomor 102 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dijelaskan bahwa Tugas Pokok Camat adalah Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat serta pelayanan umum di kecamatan. Adapun tugas Camat sebagai berikut :

1. Merumuskan konsep kerja kecamatan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum;
5. Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan social;
6. Menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;

8. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
9. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai petanggungjawaban pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

3. Susunan organisasi Camat adalah sebagai berikut :

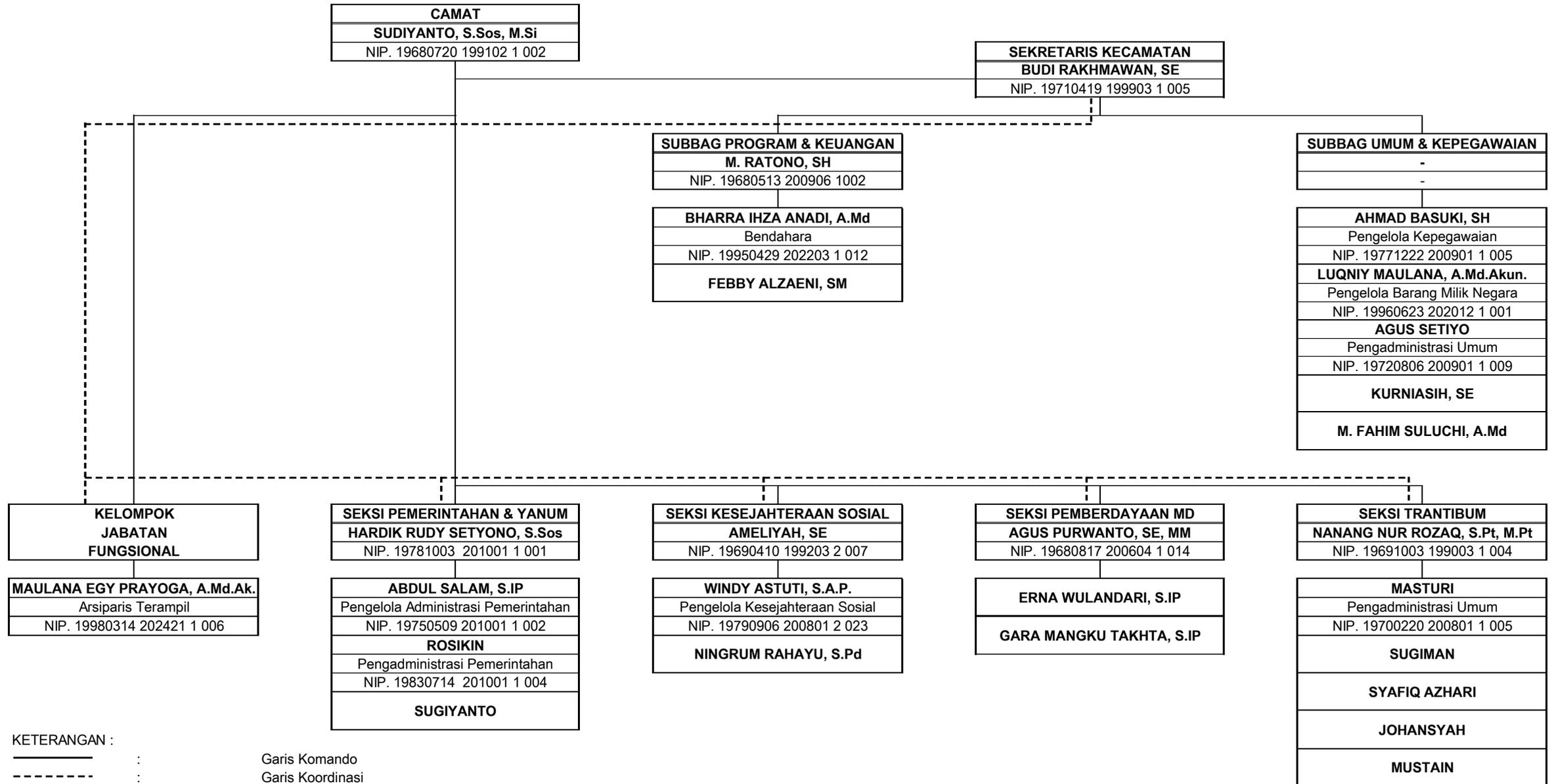
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat di tingkat kecamatan yang terdapat di dalam struktur organisasi Kecamatan Songgom. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Songgom yang berada di bawah camat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan :
 - Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub.Bagian Program dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Brebes Nomor 13 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas pada unsur Organisasi Terendah di Kecamatan telah semakin memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki Kecamatan. Keputusan Bupati Brebes Nomor 032 Tahun 2013 tentang Kecamatan, sebagai Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah menyerahkan 4 (empat) macam perijinan yang dilimpahkan ke Kecamatan. Dari penjelasan tersebut fungsi Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Songgom kami sajikan dalam bagan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2024 KECAMATAN SONGGOM



KETERANGAN :
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

A.2.Susunan Sumber Daya dan Sarana Prasarana

Kecamatan Songgom didukung dengan sumber daya yang cukup memadai dari sisi kualitas dan kuantitas, dukungan dari sumberdaya tersebut antara lain :

1. Kepegawaian

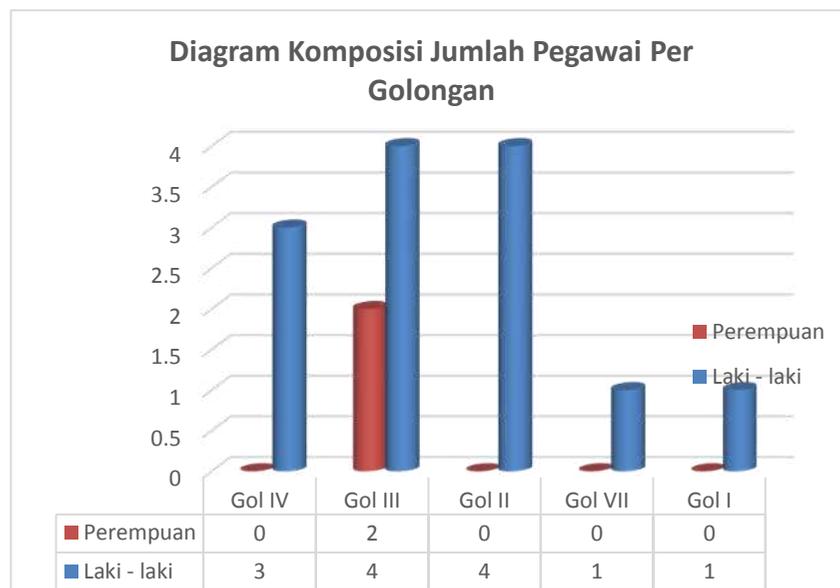
Jumlah ASN di lingkungan Kecamatan Songgom sebanyak 15 pegawai dengan komposisi untuk Golongan I sebanyak 1 orang, dan untuk golongan II sebanyak 4 orang, untuk Golongan III sebanyak 6 orang serta untuk Golongan IV sebanyak 3 orang, data tersebut digambarkan sebagaimana diagram dibawah ini :

Tabel 1.1
Komposisi Jumlah Pegawai Per Golongan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Gol	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Gol IV	3	-	3
2	Gol III	4	2	6
3	Gol II	4	-	4
4	Gol VII	1	-	1
5	Gol I	1	-	1
	Jumlah	13	2	15

Tabel tersebut dapat ditampilkan dalam diagram sebagai berikut :

Diagram 1.2
Prosentase

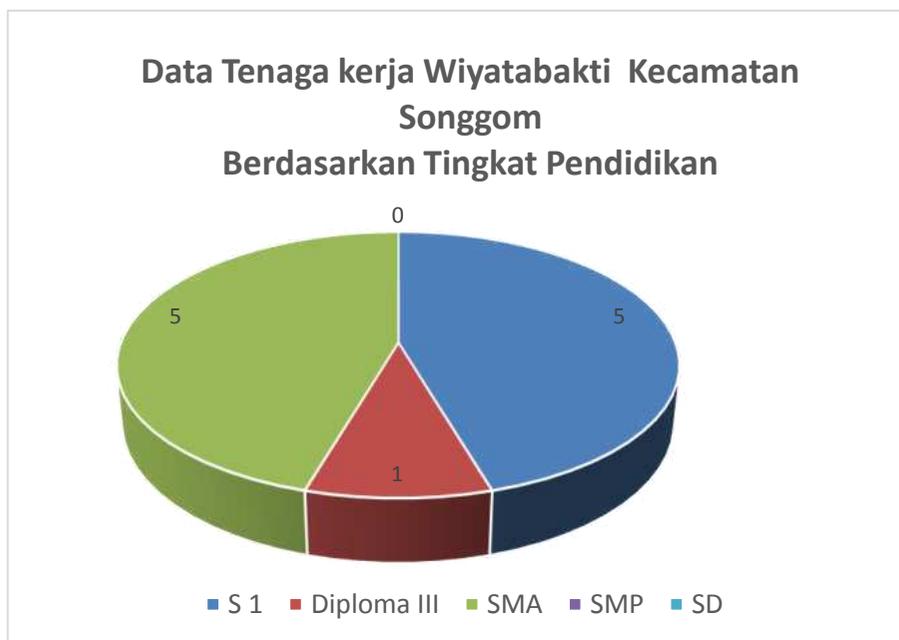


Tabel 1.3
DATA TENAGA KERJA WIYATA BHAKTI KECAMATAN SONGGOM
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Sarjana	5	Jumlah Laki - laki : 8 orang, Jumlah Perempuan : 3 orang
2	DIII	1	
3	SLTA	5	
4	SMP	-	
	SD		
	Jumlah :	11	

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Songgom Tahun 2024 ;

Diagram 1.4
Prosentase



2. Sarana dan Prasarana :

Sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan pada Kecamatan Songgom sebagaimana ditampilkan dalam bentuk Tabel di bawah ini :

Tabel 1.5.
Sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan pada
Kecamatan Songgom

NO	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	KONDISI BARANG			JUMLAH	SATUAN
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK		
1	2	3	4	5	6	7
1	Luas Tanah	14000	0	0	14000	M2
2	Gedung	6	0	0	6	
3	Ruang Kerja	11	0	0	11	
4	Generating Set	0	2	0	2	Unit
5	Kendaraan Dinas Roda 4	1	0	0	1	Unit
6	Kendaraan Dinas Roda 2	6	0	0	6	Unit
7	Lemari Kayu	4	1	0	5	Unit
8	Rak Besi	3	0	0	3	Unit
9	Filling Cabinet Besi	16	0	0	16	Unit
10	CCTV	1	0	0	1	Unit
11	Papan Visual	1	0	0	1	Unit
12	Overhead Projector	2	0	0	2	Unit
13	Layar LCD Projector	2	0	0	2	Unit
14	Meja Kerja Kayu	17	0	0	17	Unit
15	Meja Rapat	4	0	0	4	Unit
16	Meja Resepsionis	2	0	0	2	Unit
17	Kursi Plastik	200	0	0	200	Buah
18	Kursi Rapat	20	0	0	20	Buah
19	Kursi Tamu	2	0	0	2	Buah
20	Kursi Lipat	184	0	0	184	Buah
21	Bangku Tunggu	12	0	0	12	Buah
22	Sofa	1	0	0	1	Unit
23	Tempat Tidur	1	0	0	1	Unit
24	Mesin Pemotong Rumput	1	0	0	1	Buah
25	Mesin Cuci	1	0	0	1	Buah
26	Lemari Es	1	0	0	1	Buah
27	AC	7	0	0	7	Buah
28	Kipas Angin	14	0	0	14	Buah
29	TV	2	0	0	2	Buah
30	Sound System	3	0	0	3	Unit
31	Microphone	3	0	0	3	Buah
32	Power Supply	8	0	0	8	Buah
33	Camera Video	1	0	0	1	Buah
34	Tangga Aluminium	1	0	0	1	Buah
35	Mimbar/Podium	1	0	0	1	Buah
36	Meja Pejabat	8	0	0	8	Buah
37	Kursi Pejabat	6	0	3	9	Buah
38	Lemari Arsip	7	0	0	7	Buah
39	Audio Amplifier	2	0	0	2	Buah
40	Camera Elektrik	1	0	0	1	Buah
41	Tripod Camera	1	0	0	1	Buah
42	Unit Tranceiver FM	1	0	0	1	Unit
43	Antena UHF	1	0	0	1	Unit

NO	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	KONDISI BARANG			JUMLAH	SATUAN
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK		
44	Antena SHP	1	0	0	1	Unit
45	Local Area Network (LAN)	1	0	0	1	Unit
46	Jaringan Komputer Lainnya	3	0	0	3	Unit
47	PC	13	0	0	13	Unit
48	Laptop/Notebook	6	3	2	11	Unit
49	Printer	13	0	0	13	Unit
50	Scanner	1	0	0	1	Unit
51	Router	1	0	0	1	Buah
52	Peralatan Jaringan Lainnya	2	0	0	2	Unit
53	Sumur Resapan	1	0	0	1	Buah
54	Ilmu Pengetahuan Umum	1	0	0	1	Buah
55	LCD Monitor	1	0	0	1	Unit
56	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	3	0	0	3	Unit
57	Dispencer	1	0	0	1	Unit
58	Meteran Dorong	1	0	0	1	Buah
59	Rak Arsip	1	0	0	1	Set

Sumber : Data arsip barang Kecamatan Songgom Tahun 2024

B. FUNGSI STRATEGIS KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, fungsi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum;
2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI KECAMATAN

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Kantor Kecamatan Songgom yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Belum optimal dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
3. Belum maksimal dalam pemungutan PBB;
4. Belum optimal dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Isu – isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Songgom Adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan Pembinaan untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Bimtek;
2. Memberikan motivasi dan meningkatkan integritas karyawan;
3. Memberikan sosialisasi dan himbauan ke desa-desa terkait pembayaran PBB;
4. Meningkatkan kinerja Petugas PATEN
5. Melakukan Bimtek – bintek ADD dan Bantuan Keuangan Desa
6. Memberdayakan Pendamping Desa
7. Meningkatkan integritas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa.

D. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP 2024

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, maka setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) PADA Inspektorat. Progres nilai hasil evaluasi SAKIP di Kecamatan Songgom pada Tahun 2020-2024 Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.7 Progres Nilai SAKIP Kecamatan Songgom

NO	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2020	-	-
2	2021	77,2	BB (Sangat Baik)
3	2022	68,45	B (Baik)
4	2023	70,45	BB (Sangat Baik)

Gambar 1.8 Rekomendasi dan Hasil Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2023
Kecamatan Songgom

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1. Melakukan penyesuaian target kinerja yang realistis, menantang dan dapat dicapai (achievable), sehingga target kinerja sesuai dengan kondisi riil yang akan dicapai.	1. OPD Kecamatan Songgom menyusun dan menetapkan target kinerja pada dokumen perjanjian kinerja
2. Memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja.	2. OPD Kecamatan Songgom akan menggunakan Aplikasi dalam melakukan pengumpulan data kinerja sesuai dengan SOP yang ada.
3. Mendorong komitmen kepada seluruh unit kerja untuk melakukan pengumpulan dan pengukuran atas capaian kinerja dan evaluasi secara berjenjang, sehingga dapat mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas untuk menunjang efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran dalam mendukung capaian kinerja.	3. Pimpinan OPD / Camat dalam setiap Rakor Eksternal dan Rakor Internal akan Mendorong Komitmen kepada seluruh unit kerja untuk melakukan pengumpulan dan pengukuran atas capaian kinerja dan evaluasi secara berjenjang, sehingga dapat mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas untuk menunjang efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran dalam mendukung capaian kinerja.
4. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam Laporan Kinerja yang akan datang agar dapat menyajikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja).	4. OPD akan meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam Laporan Kinerja yang akan datang agar dapat menyajikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja).
5. Melaksanakan Monev Triwulan dengan menambahkan informasi faktor pendorong, faktor penghambat dan rencana perbaikan / rekomendasi untuk capaian kinerja dalam setiap triwulan pada level unit kerja dan bidang/bagian secara berjenjang.	5. OPD dalam melakukan Monev Triwulan akan menambahkan informasi faktor pendorong, faktor penghambat dan rencana perbaikan / rekomendasi untuk capaian kinerja dalam setiap triwulan pada level unit kerja dan bidang/bagian secara berjenjang.
6. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala pada level perangkat daerah dan level unit kerja dibawahnya secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	6. OPD akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala pada level perangkat daerah dan level unit kerja dibawahnya secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SONGGOM

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kearah penyelenggaraan Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai koordinator perangkat daerah, proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan daerah serta pembinaan administrasi dan pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah Kecamatan berperan penting dalam membangun dan mensinergiskan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan OPD menuju Visi utama Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Brebes yaitu **‘Menuju Kabupaten Brebes yang Unggul , Sejahtera dan Berkeadilan’**. Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat. Dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi LKjIP Kecamatan Songgom Tahun 2024 dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Kecamatan diberikan tugas :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penetapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada dikecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan ;
- j. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Songgom dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan

Sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Songgom maka ditetapkan tujuan Kecamatan Songgom adalah Terwujudnya pelayanan umum yang baik dan profesional.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Songgom yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan awal renstra tahun 2023-2026.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Kecamatan Songgom tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang bersih dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Profesionalisme bagi aparatur	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan dan Desa	Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Misi II : Mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan berkualitas;			
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan berkualitas didukung sarana dan prasarana yang memadai.	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan public yang cepat, tepat dan berkualitas	Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan didukung sarana dan prasarana yang layak	Peningkatan sumber daya sarana prasarana dan peningkatan tertib administrasi
Meningkatnya ketersediaan informasi dan data yang berkualitas sebagai dasar tata kelola pemerintahan dan pembangunan.	Meningkatnya ketersediaan informasi data yang berkualitas sebagai dasar tata kelola pemerintahan dan pembangunan	Meningkatkan pelayanan kepada publik yang akurat, cepat, tepat dan berkualitas	Meningkatnya ketersediaan informasi dan data yang berkualitas sebagai dasar tata kelola pemerintahan dan pembangunan
MISI III : Mewujudkan budaya tertib hukum dan tertib lingkungan dalam masyarakat			
Meningkatnya kesadaran Aparatur dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan .	Meningkatnya Kesadaran hidup yang tertib hukum dan tertib lingkungan untuk menciptakan pemerintah kecamatan dan Desa bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku	Fasilitasi perencanaan, sosialisasi ketertiban umum kepada aparatur Desa
MISI IV: Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat.			

<p>Meningkatkan dan memberdayakan partisipasi masyarakat perdesaan.</p>	<p>1. Terbangunnya infrastruktur desa yang memadai; Terwujudnya pembangunan perekonomian desa yang kuat; Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat perdesaan yang terjangkau; Terlaksananya pemerataan dan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat di perdesaan; Terhimpunnya investasi modal bagi pembang desa.</p>	<p>Memfasilitasi kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan baik di tingkat desa kecamatan dan kabupaten. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda dalam penciptaan lapangan kerja.</p>	<p>Membina dan memberdayakan masyarakat di desa dalam kegiatan pembangunan. Keterpaduan program pembangunan desa, daerah dan pusat. Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>
---	---	---	--

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan mewujudkan pelayanan umum yang baik dan profesional, sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan sasaran program. Adapun sasaran program OPD Kecamatan Songgom dalam upaya mewujudkan pelayanan umum yaitu :

- Presentase hasil survey IKM Kecamatan Songgom

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara penerima amanah dengan pemberi amanah selama satu tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* disamping *output* penting, dan harus adanya kesinambungan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kerja Pegawai (SKP).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
OPD KECAMATAN SONGGOM

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan songgom	95 %

ALOKASI ANGGARAN DAN JENIS BELANJA PROGRAM

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja OPD Kecamatan Songgom tahun 2024, sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA) tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.706.008.045,-	Sumber Anggaran APBD Kabupaten Brebes
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 31.280.000,-	Sumber Anggaran APBD Kabupaten Brebes
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 24.150.000,-	Sumber Anggaran APBD Kabupaten Brebes
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 12.100.000,-	Sumber Anggaran APBD Kabupaten Brebes
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 42.906.000,-	Sumber Anggaran APBD Kabupaten Brebes
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 0,-	Sumber Anggaran APBD Kabupaten Brebes

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Songgom tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Songgom. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Songgom merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Songgom untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Songgom Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Songgom dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja ini merupakan hasil kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) format pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan pada setiap aktivitas yang dilakukan pengukuran kinerja yaitu **Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran**.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengukur Kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penerapan Kinerja. Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*) dan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Songgom dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dengan dokumen penerapan kinerja Kecamatan Songgom Tahun 2024.

Pada Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Songgom telah melaksanakan berbagai strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, berikut adalah rumusnya :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indicator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017, menggunakaninterpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90 s.d lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75,1 s.d 90	Tinggi / Berhasil
65,1 s.d 75	Sedang / Cukup Berhasil
50,1 s.d 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Capaian Kinerja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realiasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional).

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Songgom Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	PRESENTASE CAPAIAN IKU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Songgom	95	83,73	88,14 %

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator yang telah ditargetkan :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian pada sasaran strategis kepuasan masyarakat terhadap Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Songgom Realisasi di capai 83,73 dan Prosentase Capaian Indikator Kinerja Utamanya sebesar 88,14 % dari target yang ditentukan yaitu 95 di Tahun 2024, adapun hal yang mendukung dapat tercapai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Songgom yaitu :

- a. Melakukan Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran yang dilakukan secara berkala dan mendapat penilaian baik dari Masyarakat .
- b. Pelayanan yang Ramah kepada Masyarakat.
- c. Terjalinnnya komunikasi yang baik antar bagian yang terlibat langsung dalam pelayanan Masyarakat.
- d. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan.
- e. Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
- f. Membagikan Quesioner terhadap masyarakat yang mengunjungi Pelayanan di Kecamatan Songgom.

➤ *Langkah-langkah Penyusunan SKM*

- **Persiapan**

Persiapan meliputi penetapan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh unit independent, penyiapan bahan berupa kuesioner serta alat yang digunakan, penetapan responden.

- **Pelaksanaan Pengumpulan Data**

Pelaksanaan pengumpulan data meliputi pengumpulan data terhadap 9 unsur pelayanan yang telah ditetapkan, kemudian melakukan pengisian kuesioner oleh unit pelayanan kemudian dikumpulkan untuk dihitung.

Pelaksanaan pengumpulan data kuesioner dibagi menjadi dua periode per semester, dimulai dari Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan jumlah 361 orang responden.

- **Pengolahan Data**

Hasil pengolahan data dari sejumlah pengguna pelayanan 361 orang diberikan blanko kuesioner yang berisi 9 unsur penilaian. Selanjutnya setiap unsur dijumlah kumulatif dan dibagi dalam angka rata-rata, hasil dari penilaian masyarakat dikategorikan dalam penilaian kinerja unit pelayanan.

➤ *Data Responden*

Jumlah total responden dalam kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat ini berjumlah 361 orang merupakan Warga Masyarakat pengguna layanan dari Kantor Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Layanan di Kantor Kecamatan Songgom terkait pelayanan publik.

Tabel 3.1.1.

Data Responden Penerima Layanan

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	183	50,69%
		PEREMPUAN	178	49,31%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	32	8,86%
		SLTP	68	18,84%
		SLTA	224	62,05%
		DIII	0	0,00%
		SI	36	9,97%
		S2	1	0,28%

3	USIA	< 30 Tahun	232	64,27%
		31 s.d. 40 Tahun	75	20,78%
		41 s.d. 50 Tahun	39	10,80%
		51 s.d. 60 Tahun	14	3,88%
		> 60 Tahun	1	0,28%
4	PEKERJAAN	PNS	19	5,26%
		TNI	3	0,83%
		SWASTA	172	47,65%
		WIRUSAHA	55	15,24%
		LAINNYA	112	31,02%

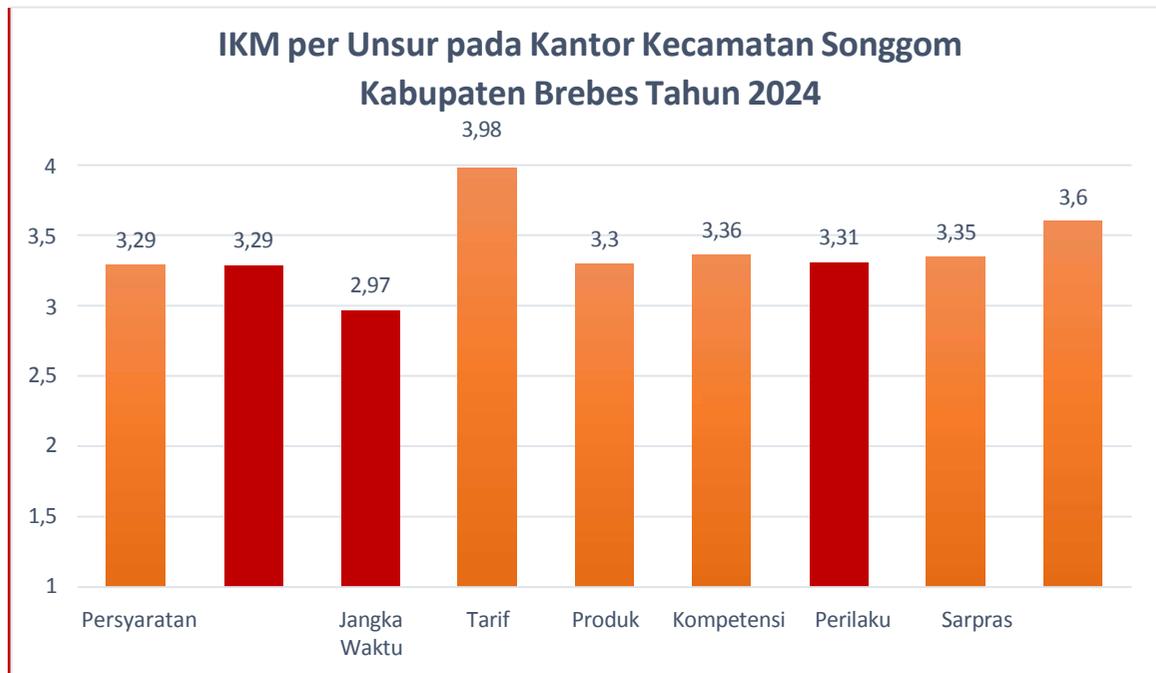
➤ *Indeks Kepuasan Masyarakat*

Pengolahan hasil survey menggunakan teknik analisis kuantitatif. Teknis analisis kuantitatif adalah analisis data yang dapat diukur dengan angka dan dilakukan dengan metode statistik. Adapun rincian hasil survey indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.2 Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,29	3,29	2,97	3,98	3,3	3,36	3,31	3,35	3,6
Kategori	B	B	C	A	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	83,73 (B atau Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



2. Perbandingan Antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir Kecamatan Songgom

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Perbandingan Capaian kinerja kecamatan Songgom dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

KURUN WAKTU	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)
2021	80,14	80,14
2022	85	77,14
2023	90	81,09
2024	95	83,73

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	PRESENTASE CAPAIAN IKU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Songgom	95	83,73	88,14 %

Dari 1 Indikator sasaran Strategis di Tahun 2024 belum mencapai target dari akhir Renstra. Dengan rendahnya realisasi di Tahun 2024 ini perlu adanya upaya lebih untuk mendorong tingkat pelayanan sehingga target kinerja di tahun selanjutnya akan meningkat dan lebih baik lagi dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, keramah tamahan petugas pelayanan dan membagikan Quesioner terhadap masyarakat yang datang ke pelayanan di Kecamatan Songgom.

4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Kecamatan Songgom Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi/Regional.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Kecamatan Songgom Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Provinsi/Regional dapat di lihat pada table berikut :

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2024	Tren rata-rata IKM Setda Jateng Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Songgom	83,73	86,25*)

*) Sumber Data dari PPID Setda Provinsi Jawa Tengah Kategori Baik

5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Kecamatan Songgom.

Secara umum disampaikan bahwa Kecamatan Songgom telah dikategorikan dengan baik dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tersebut ada beberapa penyebab keberhasilan yang bisa disampaikan sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang direncanakan.
2. Pemetaan terhadap resiko terhadap seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Kualitas layanan dan sarana prasarana yang baik.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Songgom pada Tahun Anggaran 2024, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.864.260.945.-(DPA), dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.816.444.045.-(DPPA) secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indicator Kinerja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Songgom	2.816.444.045	2.516.472.163	89,35

Dari tabel diatas dapat disimpulkan penyerapan anggaran di Kecamatan Songgom terealisasi sebesar Rp. 2.516.472.163,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.816.444.045,- atau 89,35 %. Adapun efisiensi anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

Tabel Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator	CK	PAK	RAK	Capaian Anggaran %	(PAK x CK) - RAK	PAK x CK	Tingkat Efisiensi
	Capaian Kinerja 2024	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024				
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Songgom	83,73%	2.816.444.045	2.516.472.163	89,35%	(158.263.564)	2.358.208.599	-6,71%

$$E = \frac{((2.816.444.045 \times 83.73\%)) - 2.516.472.163}{2.816.444.045 \times 83.73\%} \times 100\%$$

$$E = \frac{-158.263.564}{2.358.208.599} \times 100\%$$

$$E = -6,71\%$$

Dengan rumus diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi inefisiensi atau tidak ada efisiensi sumber daya di Kecamatan Songgom pada tahun 2024 dikarenakan target kinerja tidak tercapai.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kantor kecamatan Songgom melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 6 program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendorong pencapaian kinerja ke enam program kantor kecamatan Songgom sebesar Rp. 2.816.444.045,- dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Sisa Anggaran	%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.706.008.045,-	2.430.316.663,-	275.691.382,-	90
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	31.280.000,-	29.100.000,-	2.180.000,-	93
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	24.150.000,-	18.675.500,-	5.474.500,-	77
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	12.100.000,-	12.000.000,-	100.000,-	99
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.906.000,-	26.380.000,-	16.526.000,-	61
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,-	0,-	0,-	0
Jumlah		2.816.444.045,-	2.516.472.163,-	299.971.882,-	89

Dari tabel tersebut dan berdasarkan poin 5 dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa program yang kurang efisien dalam pencapaian kinerja kantor kecamatan Songgom Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran adalah sebesar Rp. 2.816.444.045,- terealisasi sebesar Rp. 2.516.472.163,- atau 89 %, kurangnya efisiensi penggunaan anggaran dari pagu yang ditentukan.

Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis untuk program ini didukung dengan kegiatan :

1. Pemerintahan dan Pelayanan Umum
2. Kesejahteraan Sosial
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Ketentraman dan Ketertiban

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Songgom antara lain :

1. Keterbatasan SDM yang Kompeten,
2. Alokasi Anggaran yang tidak sesuai dengan tugas – tugas di Kecamatan.
3. Terdapat kekosongan 1 (satu) Kasubbag yang cukup lama.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

1. Membantu kekompakan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas.
2. Memberangkatkan Pegawai dalam rapat atau Bimtek yang diadakan ditingkat Kabupaten.
3. Membuat Renstra atau Renja sesuai dengan kebutuhan Kecamatan.
4. Mengusulkan pengisian kekosongan pejabat.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, pada Tahun Anggaran 2024, di dukung oleh anggaran sebesar Rp. Rp. 2.816.444.045,-. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 2.118.131.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 630.913.045,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 67.400.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja
Kecamatan Songgom Tahun 2024

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS		SISA ANGGARAN
		REALISASI 2024	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.706.008.045	Rp 2.430.316.663	90%	Rp 275.691.382
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11.790.000	Rp 3.012.000	26%	Rp 8.778.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.480.000	Rp 1.480.000	100%	Rp -
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.480.000	Rp 1.480.000	100%	Rp -
Belanja Jasa	Rp 1.480.000	Rp 1.480.000	100%	Rp -
Belanja Jasa Kantor	Rp 1.480.000	Rp 1.480.000	100%	Rp -
Belanja Lembur	Rp 1.480.000	Rp 1.480.000	100%	Rp -
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.360.000	Rp -	0%	Rp 1.360.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.360.000	Rp -	0%	Rp 1.360.000

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS		SISA ANGGARAN
		REALISASI 2024	%	
Belanja Jasa	Rp 1.360.000	Rp -	0%	Rp 1.360.000
Belanja Jasa Kantor	Rp 1.360.000	Rp -	0%	Rp 1.360.000
Belanja Lembur	Rp 1.360.000	Rp -	0%	Rp 1.360.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1.942.000	Rp -	0%	Rp 1.942.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.942.000	Rp -	0%	Rp 1.942.000
Belanja Barang	Rp 54.000	Rp -	0%	Rp 54.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 54.000	Rp -	0%	Rp 54.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 54.000	Rp -	0%	Rp 54.000
Belanja Jasa	Rp 1.888.000	Rp -	0%	Rp 1.888.000
Belanja Jasa Kantor	Rp 1.888.000	Rp -	0%	Rp 1.888.000
Belanja Lembur	Rp 1.888.000	Rp -	0%	Rp 1.888.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 2.368.000	Rp -	0%	Rp 2.368.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.368.000	Rp -	0%	Rp 2.368.000
Belanja Jasa	Rp 2.368.000	Rp -	0%	Rp 2.368.000
Belanja Jasa Kantor	Rp 2.368.000	Rp -	0%	Rp 2.368.000
Belanja Lembur	Rp 2.368.000	Rp -	0%	Rp 2.368.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.000.000	Rp -	0%	Rp 3.000.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.000.000	Rp -	0%	Rp 3.000.000
Belanja Barang	Rp 24.000	Rp -	0%	Rp 24.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 24.000	Rp -	0%	Rp 24.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 24.000	Rp -	0%	Rp 24.000
Belanja Jasa	Rp 1.176.000	Rp -	0%	Rp 1.176.000
Belanja Jasa Kantor	Rp 1.176.000	Rp -	0%	Rp 1.176.000
Belanja Lembur	Rp 1.176.000	Rp -	0%	Rp 1.176.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1.800.000	Rp -	0%	Rp 1.800.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 1.800.000	Rp -	0%	Rp 1.800.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 1.800.000	Rp -	0%	Rp 1.800.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.640.000	Rp 1.532.000	93%	Rp 108.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.640.000	Rp 1.532.000	93%	Rp 108.000
Belanja Barang	Rp 80.000	Rp -	0%	Rp 80.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 80.000	Rp -	0%	Rp 80.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 80.000	Rp -	0%	Rp 80.000
Belanja Jasa	Rp 1.560.000	Rp 1.532.000	98%	Rp 28.000
Belanja Jasa Kantor	Rp 1.560.000	Rp 1.532.000	98%	Rp 28.000
Belanja Lembur	Rp 1.560.000	Rp 1.532.000	98%	Rp 28.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.110.891.000	Rp 1.905.000.884	90%	Rp 205.890.116
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.108.891.000	Rp 1.903.092.884	90%	Rp 205.798.116
Belanja Pegawai	Rp 2.108.891.000	Rp 1.903.092.884	90%	Rp 205.798.116
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.289.246.000	Rp 1.128.717.692	88%	Rp 160.528.308
Belanja Gaji Pokok ASN	Rp 920.071.000	Rp 808.623.412	88%	Rp 111.447.588

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS		SISA ANGGARAN
		REALISASI 2024	%	
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 920.071.000	Rp 808.623.412	88%	Rp 111.447.588
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp 115.820.000	Rp 102.904.120	89%	Rp 12.915.880
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp 115.820.000	Rp 102.904.120	89%	Rp 12.915.880
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp 74.615.000	Rp 68.460.000	92%	Rp 6.155.000
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp 74.615.000	Rp 68.460.000	92%	Rp 6.155.000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp 26.916.000	Rp 20.820.000	77%	Rp 6.096.000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp 26.916.000	Rp 20.820.000	77%	Rp 6.096.000
Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp 61.649.000	Rp 54.025.320	88%	Rp 7.623.680
Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 61.649.000	Rp 54.025.320	88%	Rp 7.623.680
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp 9.676.000	Rp 8.248.364	85%	Rp 1.427.636
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp 9.676.000	Rp 8.248.364	85%	Rp 1.427.636
Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp 15.000	Rp 10.612	71%	Rp 4.388
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 15.000	Rp 10.612	71%	Rp 4.388
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp 67.077.000	Rp 58.945.878	88%	Rp 8.131.122
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp 67.077.000	Rp 58.945.878	88%	Rp 8.131.122
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp 1.919.000	Rp 1.669.988	87%	Rp 249.012
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp 1.919.000	Rp 1.669.988	87%	Rp 249.012
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp 5.756.000	Rp 5.009.998	87%	Rp 746.002
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp 5.756.000	Rp 5.009.998	87%	Rp 746.002
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp 5.732.000	Rp -	0%	Rp 5.732.000
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp 5.732.000	Rp -	0%	Rp 5.732.000
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp 819.645.000	Rp 774.375.192	94%	Rp 45.269.808
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp 819.645.000	Rp 774.375.192	94%	Rp 45.269.808
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp 819.645.000	Rp 774.375.192	94%	Rp 45.269.808
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 2.000.000	Rp 1.908.000	95%	Rp 92.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.000.000	Rp 1.908.000	95%	Rp 92.000
Belanja Barang	Rp 80.000	Rp -	0%	Rp 80.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 80.000	Rp -	0%	Rp 80.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 80.000	Rp -	0%	Rp 80.000
Belanja Jasa	Rp 1.920.000	Rp 1.908.000	99%	Rp 12.000
Belanja Jasa Kantor	Rp 1.920.000	Rp 1.908.000	99%	Rp 12.000
Belanja Lembur	Rp 1.920.000	Rp 1.908.000	99%	Rp 12.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 3.000.000	Rp 1.410.000	47%	Rp 1.590.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 1.000.000	Rp -	0%	Rp 1.000.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.000.000	Rp -	0%	Rp 1.000.000
Belanja Barang	Rp 100.000	Rp -	0%	Rp 100.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 100.000	Rp -	0%	Rp 100.000

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS		SISA ANGGARAN
		REALISASI 2024	%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 100.000	Rp -	0%	Rp 100.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 900.000	Rp -	0%	Rp 900.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 900.000	Rp -	0%	Rp 900.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 900.000	Rp -	0%	Rp 900.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 1.000.000	Rp 450.000	45%	Rp 550.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.000.000	Rp 450.000	45%	Rp 550.000
Belanja Barang	Rp 100.000	Rp -	0%	Rp 100.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 100.000	Rp -	0%	Rp 100.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 100.000	Rp -	0%	Rp 100.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 900.000	Rp 450.000	50%	Rp 450.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 900.000	Rp 450.000	50%	Rp 450.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 900.000	Rp 450.000	50%	Rp 450.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 1.000.000	Rp 960.000	96%	Rp 40.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.000.000	Rp 960.000	96%	Rp 40.000
Belanja Barang	Rp 40.000	Rp -	0%	Rp 40.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 40.000	Rp -	0%	Rp 40.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 40.000	Rp -	0%	Rp 40.000
Belanja Jasa	Rp 960.000	Rp 960.000	100%	Rp -
Belanja Jasa Kantor	Rp 960.000	Rp 960.000	100%	Rp -
Belanja Lembur	Rp 960.000	Rp 960.000	100%	Rp -
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 182.617.745	Rp 159.379.000	87%	Rp 23.238.745
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 12.615.800	Rp 11.808.500	94%	Rp 807.300
Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.615.800	Rp 11.808.500	94%	Rp 807.300
Belanja Barang	Rp 12.615.800	Rp 11.808.500	94%	Rp 807.300
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 12.615.800	Rp 11.808.500	94%	Rp 807.300
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 800	Rp -	0%	Rp 800
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 12.615.000	Rp 11.808.500	94%	Rp 806.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 72.475.945	Rp 70.687.000	98%	Rp 1.788.945
Belanja Barang dan Jasa	Rp 55.075.945	Rp 54.397.000	99%	Rp 678.945
Belanja Barang	Rp 55.075.945	Rp 54.397.000	99%	Rp 678.945
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 55.075.945	Rp 54.397.000	99%	Rp 678.945
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 37.045.445	Rp 37.013.000	100%	Rp 32.445
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp 13.080.500	Rp 13.079.000	100%	Rp 1.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 4.950.000	Rp 4.305.000	87%	Rp 645.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 17.400.000	Rp 16.290.000	94%	Rp 1.110.000
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 6.500.000	Rp 6.450.000	99%	Rp 50.000
Belanja Modal Alat Kantor	Rp 6.500.000	Rp 6.450.000	99%	Rp 50.000

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS		SISA ANGGARAN
		REALISASI 2024	%	
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp 6.500.000	Rp 6.450.000	99%	Rp 50.000
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp 3.900.000	Rp 3.650.000	94%	Rp 250.000
Belanja Modal Alat Studio	Rp 3.900.000	Rp 3.650.000	94%	Rp 250.000
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000	100%	Rp -
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp 1.650.000	Rp 1.400.000	85%	Rp 250.000
Belanja Modal Komputer	Rp 7.000.000	Rp 6.190.000	88%	Rp 810.000
Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp 7.000.000	Rp 6.190.000	88%	Rp 810.000
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp 7.000.000	Rp 6.190.000	88%	Rp 810.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 9.520.000	Rp 8.725.000	92%	Rp 795.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 9.520.000	Rp 8.725.000	92%	Rp 795.000
Belanja Barang	Rp 9.520.000	Rp 8.725.000	92%	Rp 795.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 9.520.000	Rp 8.725.000	92%	Rp 795.000
Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp 9.520.000	Rp 8.725.000	92%	Rp 795.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 5.300.000	Rp 4.404.500	83%	Rp 895.500
Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.300.000	Rp 4.404.500	83%	Rp 895.500
Belanja Barang	Rp 5.300.000	Rp 4.404.500	83%	Rp 895.500
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 5.300.000	Rp 4.404.500	83%	Rp 895.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 1.840.000	Rp 950.000	52%	Rp 890.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 3.460.000	Rp 3.454.500	100%	Rp 5.500
Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 22.920.000	Rp 16.510.000	72%	Rp 6.410.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 22.920.000	Rp 16.510.000	72%	Rp 6.410.000
Belanja Barang	Rp 22.920.000	Rp 16.510.000	72%	Rp 6.410.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 22.920.000	Rp 16.510.000	72%	Rp 6.410.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 19.380.000	Rp 13.010.000	67%	Rp 6.370.000
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.540.000	Rp 3.500.000	99%	Rp 40.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 54.786.000	Rp 47.244.000	86%	Rp 7.542.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 54.786.000	Rp 47.244.000	86%	Rp 7.542.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 54.786.000	Rp 47.244.000	86%	Rp 7.542.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 54.786.000	Rp 47.244.000	86%	Rp 7.542.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 21.186.000	Rp 16.494.000	78%	Rp 4.692.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 33.600.000	Rp 30.750.000	92%	Rp 2.850.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 5.000.000	Rp -	0%	Rp 5.000.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.000.000	Rp -	0%	Rp 5.000.000
Belanja Barang	Rp 2.000.000	Rp -	0%	Rp 2.000.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 2.000.000	Rp -	0%	Rp 2.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 410.000	Rp -	0%	Rp 410.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1.590.000	Rp -	0%	Rp 1.590.000
Belanja Jasa	Rp 1.800.000	Rp -	0%	Rp 1.800.000

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS		SISA ANGGARAN
		REALISASI 2024	%	
Belanja Jasa Kantor	Rp 1.800.000	Rp -	0%	Rp 1.800.000
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	Rp 1.800.000	Rp -	0%	Rp 1.800.000
Belanja Pemeliharaan	Rp 1.200.000	Rp -	0%	Rp 1.200.000
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 1.200.000	Rp -	0%	Rp 1.200.000
Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Rp 1.200.000	Rp -	0%	Rp 1.200.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 293.936.000	Rp 266.875.279	91%	Rp 27.060.721
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 6.000.000	Rp 5.550.000	93%	Rp 450.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.000.000	Rp 5.550.000	93%	Rp 450.000
Belanja Barang	Rp 6.000.000	Rp 5.550.000	93%	Rp 450.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 6.000.000	Rp 5.550.000	93%	Rp 450.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 6.000.000	Rp 5.550.000	93%	Rp 450.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 42.856.000	Rp 35.246.079	82%	Rp 7.609.921
Belanja Barang dan Jasa	Rp 42.856.000	Rp 35.246.079	82%	Rp 7.609.921
Belanja Barang	Rp 2.131.000	Rp 1.530.000	72%	Rp 601.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 2.131.000	Rp 1.530.000	72%	Rp 601.000
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp 2.131.000	Rp 1.530.000	72%	Rp 601.000
Belanja Jasa	Rp 40.725.000	Rp 33.716.079	83%	Rp 7.008.921
Belanja Jasa Kantor	Rp 40.725.000	Rp 33.716.079	83%	Rp 7.008.921
Belanja Tagihan Telepon	Rp 275.000	Rp -	0%	Rp 275.000
Belanja Tagihan Air	Rp 1.200.000	Rp 954.150	80%	Rp 245.850
Belanja Tagihan Listrik	Rp 26.250.000	Rp 21.623.329	82%	Rp 4.626.671
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 13.000.000	Rp 11.138.600	86%	Rp 1.861.400
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 16.000.000	Rp 13.975.000	87%	Rp 2.025.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 16.000.000	Rp 13.975.000	87%	Rp 2.025.000
Belanja Barang	Rp 100.000	Rp -	0%	Rp 100.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 100.000	Rp -	0%	Rp 100.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 100.000	Rp -	0%	Rp 100.000
Belanja Pemeliharaan	Rp 15.900.000	Rp 13.975.000	88%	Rp 1.925.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 15.900.000	Rp 13.975.000	88%	Rp 1.925.000
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Rp 300.000	Rp -	0%	Rp 300.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 5.000.000	Rp 3.500.000	70%	Rp 1.500.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp 3.600.000	Rp 3.475.000	97%	Rp 125.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	100%	Rp -
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 229.080.000	Rp 212.104.200	93%	Rp 16.975.800
Belanja Pegawai	Rp 9.240.000	Rp 8.470.000	92%	Rp 770.000

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS		SISA ANGGARAN
		REALISASI 2024	%	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp 9.240.000	Rp 8.470.000	92%	Rp 770.000
Belanja Honorarium	Rp 9.240.000	Rp 8.470.000	92%	Rp 770.000
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 9.240.000	Rp 8.470.000	92%	Rp 770.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 219.840.000	Rp 203.634.200	93%	Rp 16.205.800
Belanja Jasa	Rp 219.840.000	Rp 203.634.200	93%	Rp 16.205.800
Belanja Jasa Kantor	Rp 218.240.000	Rp 202.400.000	93%	Rp 15.840.000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 218.240.000	Rp 202.400.000	93%	Rp 15.840.000
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp 1.600.000	Rp 1.234.200	77%	Rp 365.800
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp 750.000	Rp 617.100	82%	Rp 132.900
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp 850.000	Rp 617.100	73%	Rp 232.900
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 103.773.300	Rp 94.639.500	91%	Rp 9.133.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 21.585.300	Rp 17.670.000	82%	Rp 3.915.300
Belanja Barang dan Jasa	Rp 21.585.300	Rp 17.670.000	82%	Rp 3.915.300
Belanja Barang	Rp 21.585.300	Rp 17.670.000	82%	Rp 3.915.300
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 21.585.300	Rp 17.670.000	82%	Rp 3.915.300
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 21.585.300	Rp 17.670.000	82%	Rp 3.915.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 14.988.000	Rp 10.545.500	70%	Rp 4.442.500
Belanja Barang dan Jasa	Rp 14.988.000	Rp 10.545.500	70%	Rp 4.442.500
Belanja Barang	Rp 12.738.000	Rp 8.810.000	69%	Rp 3.928.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 12.738.000	Rp 8.810.000	69%	Rp 3.928.000
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp 11.688.000	Rp 7.910.000	68%	Rp 3.778.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 1.050.000	Rp 900.000	86%	Rp 150.000
Belanja Jasa	Rp 2.250.000	Rp 1.735.500	77%	Rp 514.500
Belanja Jasa Kantor	Rp 2.250.000	Rp 1.735.500	77%	Rp 514.500
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp 2.250.000	Rp 1.735.500	77%	Rp 514.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 67.200.000	Rp 66.424.000	99%	Rp 776.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 17.200.000	Rp 16.875.000	98%	Rp 325.000
Belanja Pemeliharaan	Rp 17.200.000	Rp 16.875.000	98%	Rp 325.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 17.200.000	Rp 16.875.000	98%	Rp 325.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp 7.200.000	Rp 7.000.000	97%	Rp 200.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp 8.000.000	Rp 7.975.000	100%	Rp 25.000

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS		SISA ANGGARAN
		REALISASI 2024	%	
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000	95%	Rp 100.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 50.000.000	Rp 49.549.000	99%	Rp 451.000
Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp 50.000.000	Rp 49.549.000	99%	Rp 451.000
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 50.000.000	Rp 49.549.000	99%	Rp 451.000
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp 50.000.000	Rp 49.549.000	99%	Rp 451.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 31.280.000	Rp 29.100.000	93%	Rp 2.180.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 3.780.000	Rp 1.600.000	42%	Rp 2.180.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 3.780.000	Rp 1.600.000	42%	Rp 2.180.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.780.000	Rp 1.600.000	42%	Rp 2.180.000
Belanja Barang	Rp 3.780.000	Rp 1.600.000	42%	Rp 2.180.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 3.780.000	Rp 1.600.000	42%	Rp 2.180.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 3.780.000	Rp 1.600.000	42%	Rp 2.180.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 27.500.000	Rp 27.500.000	100%	Rp -
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	100%	Rp -
Belanja Barang dan Jasa	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	100%	Rp -
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	100%	Rp -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	100%	Rp -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	100%	Rp -
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 13.100.000	Rp 13.100.000	100%	Rp -
Belanja Barang dan Jasa	Rp 13.100.000	Rp 13.100.000	100%	Rp -
Belanja Barang	Rp 13.100.000	Rp 13.100.000	100%	Rp -
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 13.100.000	Rp 13.100.000	100%	Rp -
Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100%	Rp -
Belanja Pakaian Olahraga	Rp 8.100.000	Rp 8.100.000	100%	Rp -
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 24.150.000	Rp 18.675.500	77%	Rp 5.474.500
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 24.150.000	Rp 18.675.500	77%	Rp 5.474.500
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 11.850.000	Rp 6.975.500	59%	Rp 4.874.500
Belanja Barang dan Jasa	Rp 11.850.000	Rp 6.975.500	59%	Rp 4.874.500
Belanja Barang	Rp 5.850.000	Rp 3.375.500	58%	Rp 2.474.500
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 5.850.000	Rp 3.375.500	58%	Rp 2.474.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 1.170.000	Rp 735.500	63%	Rp 434.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.500.000	Rp 240.000	16%	Rp 1.260.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 3.180.000	Rp 2.400.000	75%	Rp 780.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 6.000.000	Rp 3.600.000	60%	Rp 2.400.000

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS		SISA ANGGARAN
		REALISASI 2024	%	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 6.000.000	Rp 3.600.000	60%	Rp 2.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 6.000.000	Rp 3.600.000	60%	Rp 2.400.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 12.300.000	Rp 11.700.000	95%	Rp 600.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.300.000	Rp 11.700.000	95%	Rp 600.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 12.300.000	Rp 11.700.000	95%	Rp 600.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 12.300.000	Rp 11.700.000	95%	Rp 600.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 12.300.000	Rp 11.700.000	95%	Rp 600.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 12.100.000	Rp 12.000.000	99%	Rp 100.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 12.100.000	Rp 12.000.000	99%	Rp 100.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 12.100.000	Rp 12.000.000	99%	Rp 100.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 12.100.000	Rp 12.000.000	99%	Rp 100.000
Belanja Jasa	Rp 12.100.000	Rp 12.000.000	99%	Rp 100.000
Belanja Jasa Kantor	Rp 12.100.000	Rp 12.000.000	99%	Rp 100.000
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp 12.100.000	Rp 12.000.000	99%	Rp 100.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 42.906.000	Rp 26.380.000	61%	Rp 16.526.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 42.906.000	Rp 26.380.000	61%	Rp 16.526.000
Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Rp 42.906.000	Rp 26.380.000	61%	Rp 16.526.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp 42.906.000	Rp 26.380.000	61%	Rp 16.526.000
Belanja Barang	Rp 16.656.000	Rp 13.030.000	78%	Rp 3.626.000
Belanja Barang Pakai Habis	Rp 16.656.000	Rp 13.030.000	78%	Rp 3.626.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 382.000	Rp -	0%	Rp 382.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 454.000	Rp -	0%	Rp 454.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.120.000	Rp 2.080.000	98%	Rp 40.000
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp 11.000.000	Rp 10.950.000	100%	Rp 50.000
Belanja Pakaian Olahraga	Rp 2.700.000	Rp -	0%	Rp 2.700.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 26.250.000	Rp 13.350.000	51%	Rp 12.900.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 26.250.000	Rp 13.350.000	51%	Rp 12.900.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 26.250.000	Rp 13.350.000	51%	Rp 12.900.000
JUMLAH	Rp 2.816.444.045	Rp 2.516.472.163	89%	Rp 299.971.882

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Camat mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan umum dengan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pemerintahan tingkat kecamatan, membina kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa dan kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien, mungkin dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa SKPD Kecamatan Songgom dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan **berhasil**, karena dari semua target sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan kategori **Baik**.

Secara umum target sasaran dapat disimpulkan dengan data sebagai berikut : Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan mencapai 75% Sampai 100% (termasuk pada kategori **baik**) dengan rincian :

1. Sasaran Program 1. Prosentase nilai IKM PATEN sebesar **83, 73 %** kategori **Baik**.

B. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAPAIAN KINERJA

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran **RENSTRA KECAMATAN Tahun 2023-2026**, berikut adalah permasalahan yang menjadi hambatan bagi optimalisasi pencapaian sasaran strategis dan program pada Kecamatan Songgom, khusus capaian kinerja yang terkait dengan penanganan Isu Strategis yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Belum optimal dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
3. Belum maksimal dalam pemungutan PBB;
4. Belum optimal dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komperensif melalui pendekatan spesial sebagaimana diterapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup srategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, sebagai berikut:

1. Mengadakan Pembinaan untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Bintek;
2. Memberikan motivasi dan meningkatkan integritas karyawan;
3. Memberikan sosialisasi dan himbauan ke desa-desa terkait pembayaran PBB;
4. Meningkatkan kinerja Petugas PATEN;
5. Melakukan Bimtek – bintek ADD dan Bantuan Keuangan Desa;
6. Memberdayakan Pendamping Desa;
7. Meningkatkan integritas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa.

C. LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perencanaan kerja pada tahun berikutnya;
2. Melibatkan semua bagian dalam proses proses perencanaan kegiatan tahun berikutnya;
3. Melakukan pembinaan dan penataan pegawai agar melaksanakan tugas dan fungsinya lebih baik dan lebih bertanggungjawab;
4. Melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan internal kantor;
5. Melakukan inovasi yang efektif dan efisien untuk mencapai target yang diharapkan;
6. Melakukan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan Perencanaan Kerja pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 guna meningkatkan Kinerja OPD Kecamatan Songgom khususnya serta Pemerintah Kabupaten Brebes pada umumnya.

Songgom, 17 Februari 2025

CAMAT SONGGOM



SUDIYANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680720 199102 1 002

